

ABSTRAK

Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus memiliki karakteristik ekonomi yang unik, dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertambangan dan penerimaan dana transfer pusat, namun masih menghadapi tantangan pembangunan. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan distribusi Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta keterbatasan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara besarnya alokasi fiskal dengan pencapaian pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana otonomi khusus, dana bagi hasil, belanja barang dan jasa, tenaga kerja serta variabel *dummy* eksplorasi tambang terhadap pertumbuhan ekonomi di 29 kabupaten/kota Provinsi Papua pada periode tahun 2011-2020. Penelitian ini menggunakan data panel dan alat analisis *Least Square Dummy Variable* (LSDV) atau biasa dikenal dengan Fixed Effect Model (FEM).

Hasil estimasi menunjukkan bahwa dana otonomi khusus, belanja barang dan jasa, serta jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Papua. Dana bagi hasil *dummy* eksplorasi tambang berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan ini memberikan implikasi bahwa penguatan terhadap pemerintahan daerah agar dapat mengelola dana otonomi khusus dan belanja daerah dengan baik, efektivitas penggunaan dana bagi hasil, dan peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Papua yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Serta mendorong aktivitas eksplorasi tambang pada tahap produksi.

Kata Kunci: Data Panel, Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal, Provinsi Papua, Otonomi Khusus